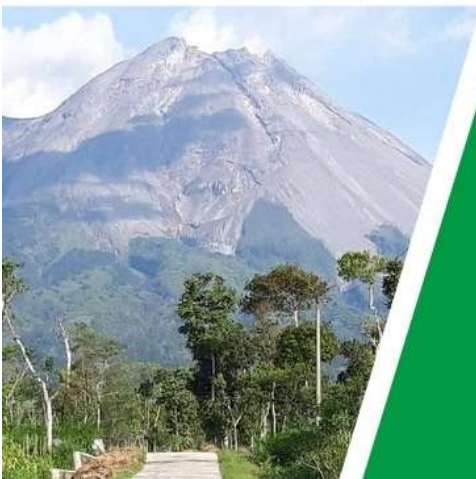


**TAHUN
2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Telp. (0274) 562811 psw 1112

Email : bpka@jogjaprov.go.id

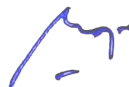
Website : <http://bpkadiy.jogjaprov.go.id>

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 diwarnai dengan agenda *refocusing* dan *realokasi* anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemic COVID-19. Sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemic COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2021
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. Beny Suharsono, M.Si
NIP. 196505121986021002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah”:
 - Diukur dengan indikator Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (kualitatif kumulatif dari meningkatnya PAD, APBD tepat dan akurat, laporan keuangan yang akuntabel, penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) program, yakni Program Peningkatan Pendapatan Daerah, Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Program Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Pendapatan KPPD dan Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 98,08%. Dengan demikian capaian ini tidak mencapai target secara optimal. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 98,07%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 100%, target tidak tercapai (target maksimal 100%)
2. Capaian sasaran 2 “Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY”:
 - Diukur dengan indikator nilai Proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah (nilai rupiah proyeksi aset pengelola barang milik daerah).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yakni, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar Rp6.453.519.026,00 sampai dengan akhir bulan Desember 2020 terealisasi Rp3.069.093.332,00 Dengan demikian capaian ini dibawah target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 47,56%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar Rp6.505.543.500,00 terjadi penurunan sebanyak Rp3.436.450.178,00 (50,44%)

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Implementasi *Performance Based Organization* terus memerlukan pendampingan dan evaluasi, termasuk merespon kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi;
2. Era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0 serta kebijakan SPBD (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang ditandai dengan disrupsi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang *internet of thing*, *artificial intelegent* dan era *big data* yang melingkupi semua bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi Nasional periode 2015 - 2019 menuju diberlakukannya Road Map Reformasi Birokrasi Nasional periode 2020 - 2024.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.4 Isu-isu Strategis	13
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020.....	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	26
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	28
3.2. Realisasi Anggaran	47
3.3. Inovasi	48
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	50

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	17
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	18
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2017-2022	21
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	22
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020	25
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2020.....	26
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	29
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.3.1 Pengukuran Capaian Sasaran 1	32
Tabel III.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	33
Tabel III.3.3 APBD Tahun 2019 dan Tahun 2020	34
Tabel III.3.4 Realiasi PAD BPKA Tahun 2019 dan 2020.....	35
Tabel III.3.5 Penetapan APBD.....	37
Tabel III.3.6 Program kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD.....	38
Tabel III.3.7 Kesesuaian dan ketepatan waktu laporan keuangan Pemda DIY	38
Tabel III.3.8 Opini BPK RI dalam 5 tahun terakhir	40
Tabel III.3.9 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2020.....	41
Tabel III.3.10 Evaluasi APBD, pembinaan dan optimalisasi BUMD	42
Tabel III.3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel III.3.12 Target dan Reliasasi Sasaran 2.....	44
Tabel III.3.13 Nilai Proyeksi optimalisasi aset	45
Tabel III.3.14 Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	47

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Pengelola Keuangan dan Aset DIY	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Pengelola Pengelola Keuangan dan Aset DIY	11
Gambar II.1 Aplikasi sengguh.jogjaprovo.go.id	21
Gambar III.1 Penghargaan yang diterima.....	40

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

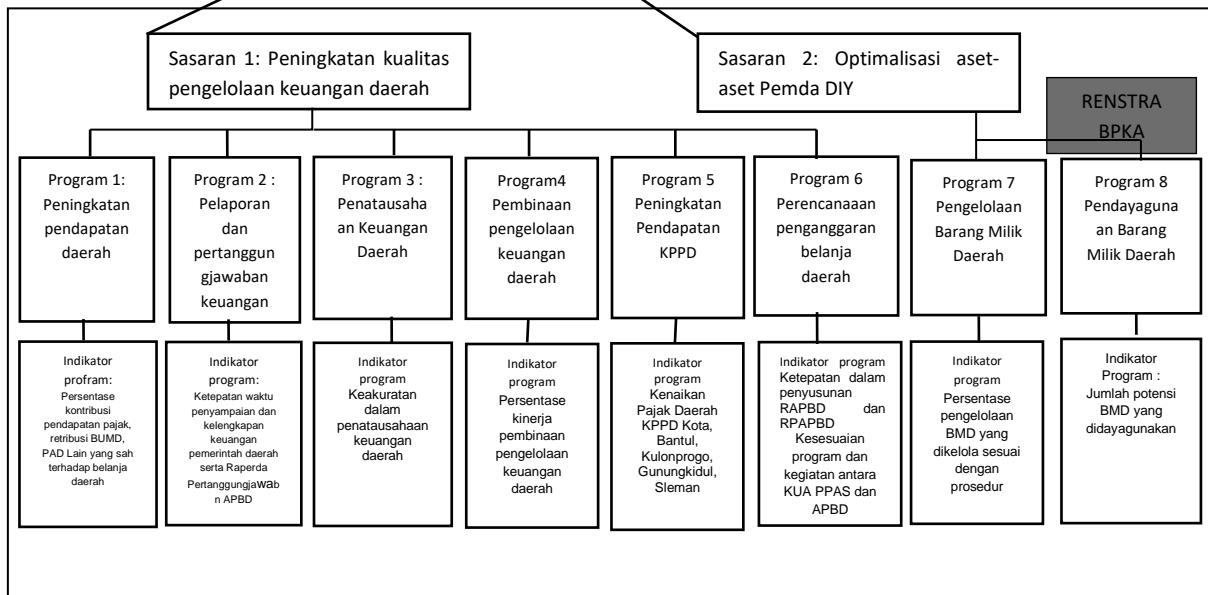
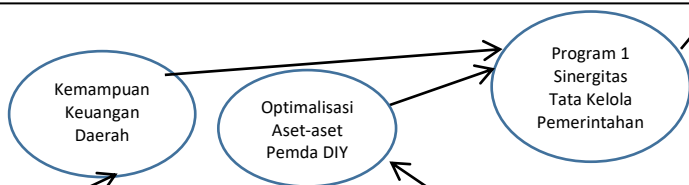
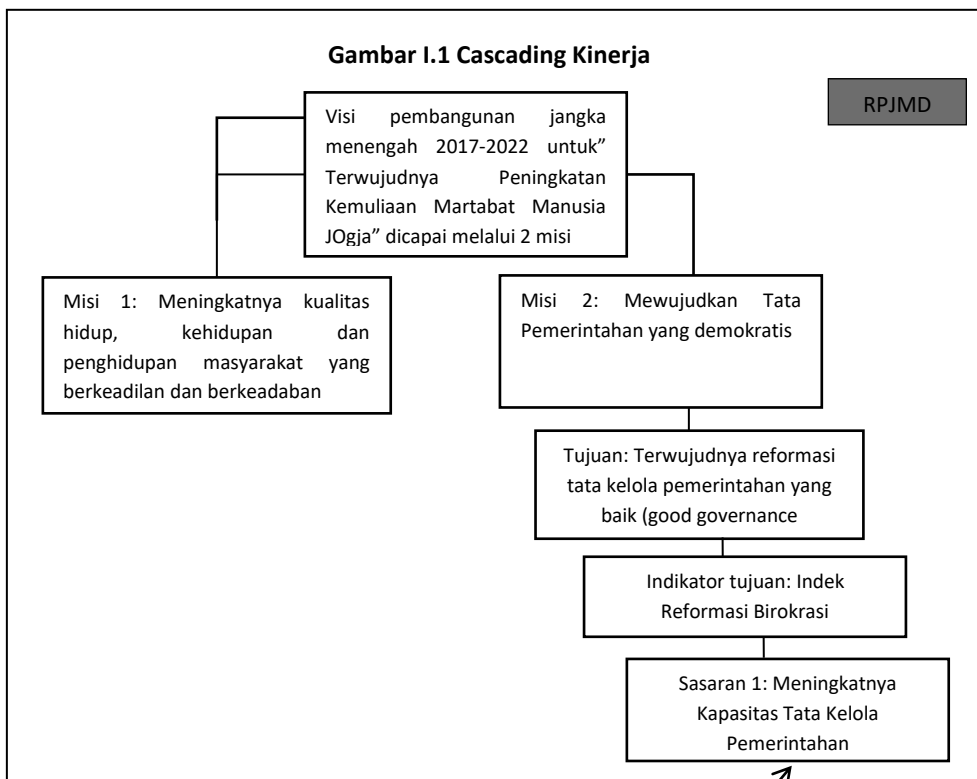
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

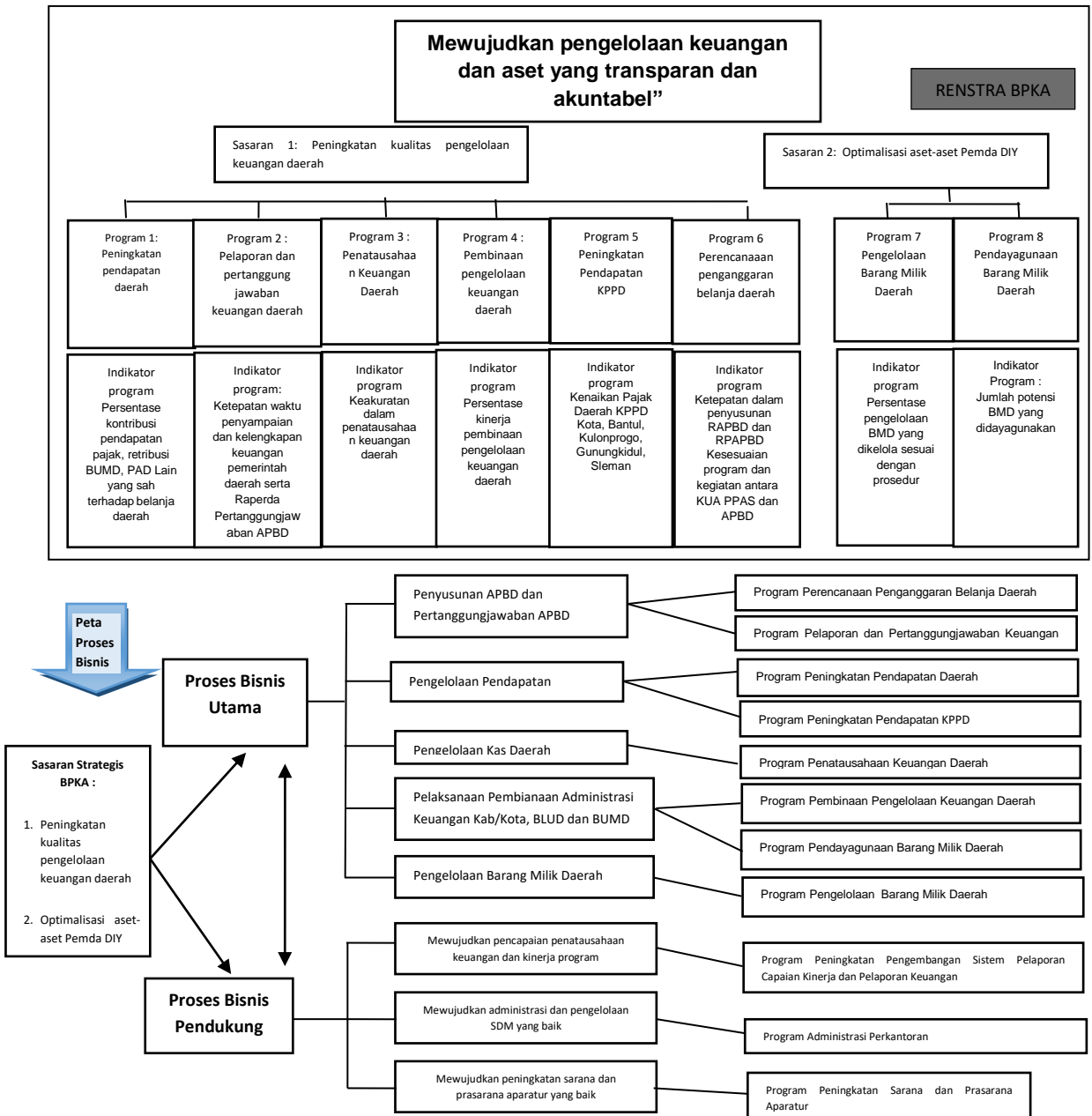
Gambar I.1 Cascading Kinerja

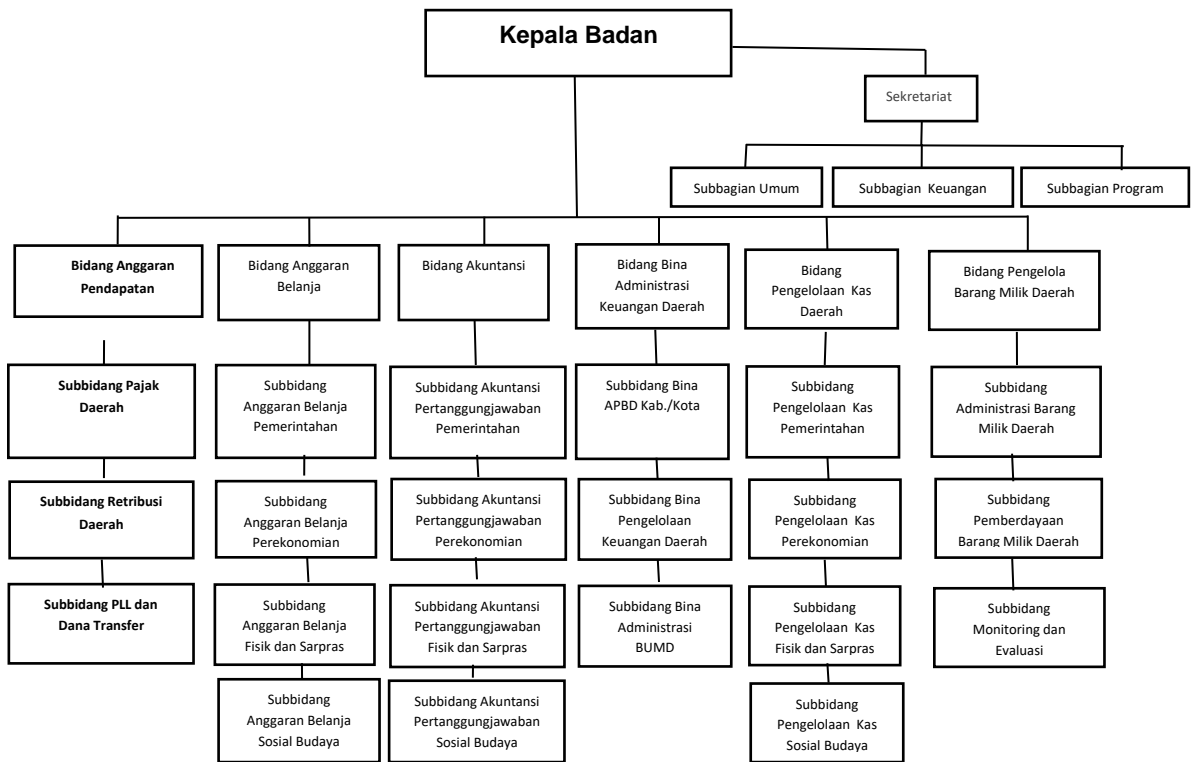


1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY





Sumber: Pergub DIY No.76 tahun 2018

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kabupaten/kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi ;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<p>1. Kepala Badan</p> <p>2. Sekretaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Umum 2) Kasubbag Program dan data TI 3) Kasubbag Keuangan <p>3. Kabidang Anggaran Pendapatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbid Pajak 2) Kasubbid Retribusi 3) Kasubbid Pendapatan Lain-lain <p>4. Kabid Anggaran Belanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Pemerintahan 2) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Perekonomian 3) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Sarpras 4) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Sosial Budaya <p>5. Kabid Akuntansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbid Akuntansi Sektor Pemerintahan 2) Kasubbid Akuntansi Sektor Perekonomian 3) Kasubbid Akuntansi Sektor Sarpras 4) Kasubbid Akuntansi Sektor Sosial Budaya 	<p>1. Dibawah Kasubbag Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Kepegawaian. 2) Pengelola Barang Milik Negara; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengadministrasi Keuangan; 5) Pengadministrasi Kepegawaian; 6) Pengadministrasi Persuratan; 7) Pranata Kearsipan; 8) Pengemudi <p>2. Dibawah Kasubbag Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pelaporan keuangan <p>3. Dibawah Kasubbag Program dan Data TI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan <p>4. Dibawah Kasubbid Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pajak <p>5. Dibawah Kasubid Retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Retribusi Daerah <p>6. Dibawah Kasubid Pendapatan Lain-Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pendapatan Lain-lain <p>7. Dibawah Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Analis Perencanaan Anggaran <p>8. Dibawah Kasubid Anggaran Belanja Sektor Perekonomian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Analis Perencanaan Anggaran <p>9. Dibawah Kasubid Anggaran Belanja Sektor Fisik dan Sarpras</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Analis Perencanaan Anggaran <p>10. Dibawah Kasubid Anggaran Belanja Sektor Sosial Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Analis Perencanaan Anggaran <p>11. Dibawah Kasubid Akuntansi Sektor Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun laporan subidang pemerintahan <p>12. Dibawah Kasubbid Akuntansi Sektor Perekonomian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun laporan subidang perekonomian <p>13. Dibawah Kasubbid Akuntansi Sektor Fisik dan Sarpras</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pengadministrasi Umum <p>14. Dibawah Kasubbid Akuntansi Sektor Sosial Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun laporan subidang Sosbud 3) Penyusun laporan subidang Fisik Sarpras

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<p>6. Kabid Pengelolaan Kas Daerah:</p> <p>1) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Pemerintahan</p> <p>2) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Perekonomian</p> <p>3) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Sarpras</p> <p>4) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Sosial Budaya</p> <p>7. Kabid Bina Adminstrasi Keuangan Daerah:</p> <p>1) Kasubbid Bina APBD Kab/Kota</p> <p>2) Kasubbid Bina Keuangan Daerah</p> <p>3) Kasubbid Bina BUMD dan BUKP</p> <p>8. Kabid Pengelolaan Barang Daerah</p> <p>1) Kasubbid Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>2) Kasubbid Pendayagunaan Barang Milik Daerah</p> <p>3) Kasubbid Minotoring dan Evaluasi</p>	<p>15. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Pemerintahah</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</p> <p>16. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Perekonomian</p> <p>1) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</p> <p>17. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Fisik dan Sarpras</p> <p>1) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</p> <p>18. Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Sosial Budaya</p> <p>1) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</p> <p>19. Dibawah Kasubbid Bina APBD Kab/Kota</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis pengelola keuangan</p> <p>20. Dibawah Kasubbid Bina Keuangan Daerah</p> <p>1) Analis pengelola keuangan</p> <p>21. Dibawah Kasubbid Bina BUMD dan BUKP</p> <p>1) Pengevaluasi Perkembangan BUMD</p> <p>22. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Pengelola Kekayaan Daerah</p> <p>23. Dibawah Kasubbid Pendayagunaan Barang Milik Daerah</p> <p>1) Analis Pengelola Kekayaan Daerah</p> <p>24. Dibawah Kasubbid Minotoring dan Evaluasi</p> <p>1) Analis Pengelola Kekayaan Daerah</p>

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel”, antara lain sebagai berikut :

1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut

aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dimanfaatkan untuk pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas
Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						
1	Kepala Badan	1	S2, S1	0			
2	Sekretaris	1	S2, S1	1	S2		1
3	Kabid Anggaran Pendapatan	1	S2, S1	1	S1	1	
4	Kabid Anggaran Belanja	1	S2, S1	1	S1		1
5	Kabid Pengelolaan Kas Daerah	1	S2, S1	1	S2		1
6	Kabid Bina Administrasi Keuangan Daerah	1	S2, S1	1	S1		1
7	Kabid Akuntansi	1	S2, S1	1	S2		1
8	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	S2, S1	1	S1	1	

9	Kepala Subbagian Program	1	S1	1	S1		1
10	Kepala Subbagian Keuangan	1	S1	1	S1	1	
11	Kepala Subbagian Umum	1	S1	1	S1	1	
12	Kepala Subbidang Pajak Daerah	1	S1	1	S2		1
13	Kepala Subbidang Retribusi Daerah	1	S1	1	S2	1	
14	Kepala Subbidang Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer	1	S1	1	S1	1	
15	Kepala Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan	1	S1	1	S1		1
16	Kepala Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian	1	S1	1	S2		1
17	Kepala Subbidang Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana	1	S1	1	S1	1	
18	Kepala Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya	1	S1	1	D3	1	
19	Kepala Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan	1	S1	1	S1		1
20	Kepala Subbidang Pengelola Kas Perekonomian	1	S1	1	S1		1
21	Kepala Subbidang Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana	1	S1	1	S2		1
22	Kepala Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya	1	S1	1	S2		1
23	Kepala Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	1	S1	1	S2	1	
24	Kepala Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	1	S1	1	S2		1
25	Kepala Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah	1	S1	1	S1		1
26	Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan	1	S1	1	S2	1	
27	Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaba Perekonomian	1	S1	1	S2	1	
28	Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana	1	S1	1	S1		1
29	Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya	1	S1	1	S1		1
30	Kepala Subbidang Administrasi Barang Milik Daerah	1	S1	1	S2		1
31	Kepala Subbidang Pendayagunaan Barang Milik Daerah	1	S1	1	S2	1	
32	Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi	1	S1	1	S1	1	
33	Kepala KPPD DIY	5	S2, S1	5	S1: 1, S2: 4	3	2
34	Kepala Subbag Tata Usaha	5	S1	5	S1: 4, S2: 1	4	1
35	Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan	5	S1	5	S1: 5	4	1
36	Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan	5	S1	4	S1: 3, S2: 1	4	

B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
37	Analisis Pajak	4	S1	2	S1	1	1
38	Analisis Pajak/Retribusi Daerah	4	S1	3	S1	1	2
39	Analisis Pendapatan Daerah	4	S1	3	S1, SLTA	1	2
40	Analisis Perencanaan Anggaran	18	S1	13	S2,S1,SLTA	6	7
41	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	12	S1	13	S2,S1,SLTA	5	8
42	Analisis Pengelolaan Keuangan	8	S1	3	S1,SLTA	2	1
43	Pengevaluasi Perkembangan BUMD	3	S1	2	S1	2	
44	Penyusun Laporan Keuangan	12	S1	9	S2,S1,D3,SLTA	6	3
45	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	12	S1	14	S2,S1,SLTA	8	6
46	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	29	D3, S1	13	SMP: 1, SMA: 6+x, S1: 1+x	10	3
47	Verifikator Pajak	52	D3, S1	17	SMA: 2+1+1+y, SMK: 1, D3: x+1, S: 1+x+y, S2: 1+x	3+3+x+2+3	1+x+1
48	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	16	D3	7	SMA: 4, D3: 1, D4:1, S1: 1	5	2
49	Pengadministrasi Pajak	41	D3	9	SMA: x, S1: 3+x+2	6	3
50	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	27	D3, S1	11	SD: x, SMA: 1+y, D3: 1, S1: 2+x+y	1+1+x+1	1+1+x+3
51	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	18	D3, D4, S1	7	SMA: 1, S1: 5	6	1
C.	Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif						
52	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	9	S1	7	D3: 1, S1: 2, S2: 4	3	4
53	Pengelola Sistem dan Jaringan	2	S1	1	S1	1	
54	Bendahara	14	D3, S1	13	SMA: 7, S2: x, S1 : x+3	8	5
55	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	D3	1	S1	1	
56	Pengelola Akuntansi	6	D3	3	SMA: 2, SMK: 1	1	2
57	Pengelola Gaji	5	D3	2	SMA: 1, S1: 1	2	
58	Pengadministrasi Keuangan	10	D3	2	SMA: 2		2
59	Pengelola Barang Milik Negara	12	D3, S1	7	SMA: 2, D3: 1, D4: 1, S1: 3	6	1
60	Pengadministrasi Kepegawaian	7	D3	6	SMA: 3, D3: 1, S1: 2	4	2
61	Pengadministrasi Umum	7	D3	6	D3, SLTA, SMP	3	3
62	Pengadministrasi Persuratan	8	SMA, SMK, D3	3	SMA: 2, S1: 1	2	1

63	Pranata Kearsipan	8	D3	3	SMP: 1, D3: 1, S1: 1	2	1
64	Teknisi Sarana dan Prasarana	6	SMA, SMK, D3	2	SMP: 1, SMA: 1	2	
65	Pengemudi	5	SMA, SMK	1	SMP: 1	1	
66	Pengelola Kearsipan dan Bahan Pustaka	1	SMA, D3	1	SMA	1	
	Jumlah	417		234		145	89

Sumber Data : BPKA DIY, Januari 2021 (data kepegawaian diolah)

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 111 orang (47,44%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 65 orang (27,78%), S2 40 orang (17,09%), D3 sebanyak 11 orang (4,70%), SMP sebanyak 5 orang (2,14%), D4 sebanyak 1 orang (0,43%) dan SD sebanyak 1 orang (0,43%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, yaitu laki-laki sejumlah 145 orang dan perempuan sebanyak 89 orang.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 185 orang, terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 127 orang pejabat pelaksana substantif dan 56 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 53 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Tanah dan bangunan	24 bidang 83 unit	218.780.997.049,-
2	Alat-alat Angkutan	52 unit	5.935.317.342,-
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	9.154 unit	43.061.798.805,-
4	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	754 unit	5.535.871.846,-
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	2.476 buku	216.453.690,-
2	Barang bercorak Kebudayaan	12 unit	2.600.000,-
	Jumlah		273.533.038.732,-

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2020

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 52 unit, kendaraan dinas jabatan 1 unit, kendaraan operasional 27 unit, dan 24 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca/perpustakaan, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja,

kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai adalah 540 : 234. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2019	Rp102.932.963.264,00	Rp 52.220.139.867,00	Rp155.153.103.130,00
2020	Rp113.450.662.402,00	Rp106.783.652.150,00	Rp220.234.314.552,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY berasal dari APBD DIY dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2020 dibanding tahun 2019 terdapat kenaikan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp10.517.699.138,- karena mengakomodir gaji CPNS Pemda DIY, sedang belanja langsung naik cukup signifikan yaitu sebesar Rp54.563.512.283,-, yang bersumber dari Dana Keistimewaan dialokasikan untuk pembebasan tanah.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/00868, tanggal 13-03-2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai. 2. Berupaya meningkatkan kinerja pada aspek Perencanaan Kinerja, aspek Pengukuran kinerja dan aspek Pelaporan kinerja. 	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan rutin pegawai mingguan, maupun pembinaan rutin kepegawaian melalui sistem/aplikasi yang ada; 2. Memperbaiki Renstra dengan mencantumkan Inovasi pada Renstra Reviu, mengimplementasikan kinerja utama sebagai bahan alat penilaian, pengendalian serta pemantauan kinerja, menginformasikan kinerja, pencapaian sasaran sasaran kinerja yang dilaporkan dan perolehan kinerja secara informatif melalui media resmi instansi.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

- 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan*
- 3. Struktur Program dan Kegiatan 2020*
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020*
- 5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun Tahun 2020 diwarnai dengan agenda refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemic COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui Revisi/Perubahan Perjanjian Kinerja 2020. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemilihan ekonomi dari dampak pandemic COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengusahakan optimalisasi pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan.

Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selama lima tahun adalah :

“Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel”

Adapun sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2017-2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	n/a	100	100	100	100	100	100
2.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	n/a	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.967.568.518

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Perbaikan manajemen terhadap semua proses bisnis	1. Menggali dan mengtimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber –sumber pendapatan daerah
			2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sdm pengelola pendapatan
			3. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan
			4. Meningkatkan sarpras yang mendukung peningkatan pendapatan
			5. Peningkatan dan inovasi pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat/wajib pajak
2.	Optimalisasi asset-aset Pemda DIY	1. Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk diperoleh asset idle 2. Mengevaluasi atas pelaksanaan road map pemanfaatan BMD	1. Meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme maupun produktifitas SDM pengelola barang di Pemda DIY
			2. Meningkatkan peran optimalisasi BMD sebagai kontributor peningkatan pendapatan
			3. Penyusunan SOP pengelolaan BMD
			4. Monev dan pendampingan pengelolaan BMD pada OPD

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1. Program Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.133.300.000,00	910.057.500,00	(223.242.500,00)
	1.1.1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	711.100.000,00	700.600.000,00	(10.500.000,00)
	1.1.2. Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	422.200.000,00	209.457.500,00	(212.742.500,00)
	1.2. Program Penatausahaan Keuangan Daerah	374.630.000,00	449.997.500,00	75.367.500,00
	1.2.1. Pengendalian Belanja Langsung	210.390.000,00	248.557.500,00	38.167.500,00
	1.2.2. Pengendalian Belanja Tidak Langsung	164.240.000,00	201.440.000,00	37.200.000,00
	1.3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.217.970.000,00	798.106.000,00	(419.864.000,00)
	1.3.1. Bina APBD Kab/Kota	397.570.000,00	356.444.000,00	(41.126.000,00)
	1.3.2. Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	80.400.000,00	34.641.000,00	(45.760.000,00)
	1.3.3. Bina Administrasi BUMD dan BUKP	740.000.000,00	407.022.000,00	(332.978.000,00)
	1.4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.544.560.000,00	2.160.523.000,00	(384.037.000,00)
		Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/

Sasaran	Program/Kegiatan			Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	1.4.1. Perencanaan Pendapatan Daerah	107.470.000,00	76.810.000,00	(30.660.000,00)
	1.4.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2.437.090.000,00	2.083.713.000,00	(353.377.000,00)
	1.5. Program Peningkatan Pendapatan KPPD	8.869.241.160,00	6.938.366.310,00	(1.930.874.850,00)
	1.5.1 Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kota Yogyakarta	982.495.600,00	633.983.500,00	(348.512.100,00)
	1.5.2 Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	534.250.000,00	393.290.000,00	(140.960.000,00)
	1.5.3 Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kabupaten Bantul	1.561.225.040,00	1.107.237.000,00	(453.988.040,00)
	1.5.4 Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	357.980.000,00	348.260.000,00	(9.720.000.000,00)
	1.5.5 Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kabupaten Gunungkidul	1.191.142.880,00	837.322.000,00	(353.820.880,00)
	1.5.6 Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Gunungkidul	485.392.000,00	476.109.000,00	(9.283.000,00)
	1.5.7 Pelayanan Kesamsatan KPPD Kulonprogo	897.516.040,00	672.481.040,00	(225.035.000,00)
Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.5.8 Pendataan Potensi	386.133.000,00	289.013.000,00	(97.120.000,00)

	dan Penagihan Piutang KPPD Kulonprogo			
	1.5.9 Pelayanan Kesamsatan KPPD Sleman	1.716.219.600,00	1.423.783.770,00	(292.435.830,00)
	1.5.10 Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Sleman	756.887.000,00	756.887.000,00	0,00
	1.6 Program Perencanaan Penggangan Belanja Daerah	3.923.370.000	3.459.527.000,00	(463.843.000,00)
	1.6.1 Penyusunan APBD	3.090.924.000,00	2.794.894.000,00	(296.030.000,00)
	1.6.2 Penyusunan Perubahan APBD	832.446.000,00	664.633.000,00	(167.813.000,00)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	85.668.171.160,00	82.295.377.310	(3.372.793.850,00)
2.Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	2.1. Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	846.560.000,00	122.944.000,00	(723.616.000,00)
	2.1.1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah	324.060.000,00	12.910.000,00	(311.150.000,00)
	2.1.2 Penilaian Barang Milik Daerah	522.500.000,00	110.034.000,00	(412.466.000,00)
	2.2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.597.456.000,00	2.734.387.500,00	136.931.500,00
	2.2.1. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	238.670.000,00	175.026.000,00	(63.644.000,00)
	2.2.2. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	343.400.000,00	244.595.000,00	(98.805.000,00)
	2.2.3. Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	2.015.386.000,00	2.314.766.500,00	299.380.500,00
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	3.444.016.000,00	2.857.331.500,00	(586.684.500,00)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		89.112.187.160,00	85.152.708.810,00	(3.959.478.350,00)

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	11.512.209.760,00	10.321.487.840,00	(1.190.721.920,00)
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.880.019.000,00	7.454.111.035,00	574.092.035,00
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.432.190.760,00	2.280.845.805,00	(151.344.955,00)
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.200.000.000,00	586.531.000,00	(1.613.469.000,00)
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.077.927.000,00	11.224.268.100,00	(10.853.658.900,00)
	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	6.579.257.000,00	173.082.700,00	(6.406.174.300,00)
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.434.324.000,00	2.482.203.500,00	(952.120.500,00)
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.295.450.000,00	1.030.140.900,00	(265.309.100,00)
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	2.081.278.000,00	1.757.733.000,00	(323.545.000,00)
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	850.718.000,00	632.208.000,00	(218.510.000,00)
3.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	153.450.000,00	85.187.400,00	(68.262.600,00)
	3.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9.720.000,00	9.720.000,00	00,00
	3.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25.000.000,00	23.880.000,00	(1.120.000,00)
	3.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	97.980.000,00	34.740.000,00	(63.240.000,00)
	3.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program / Kegiatan SKPD	20.750.000,00	16.847.400,00	(3.902.600,00)
	Total Anggaran Pendukung	33.743.586.760,00	21.630.943.340,00	(12.112.643.420,00)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	I	17,00
					II	50,00
					III	72,00
					IV	100,00
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	6.234.617.858,83	I	187.038.535,00
					II	3.740.770.716,00
					III	4.987.694.287,00
					IV	6.234.617.858,83

Pada tahun 2020 Perangkat Daerah melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan *realokasi* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	I	21,00
					II	48,00
					III	75,00
					IV	100,00
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	6.453.617.858	I	193.605.570,00
					II	3.872.111.415,00
					III	5.162.815.220,00
					IV	6.453.617.858,00

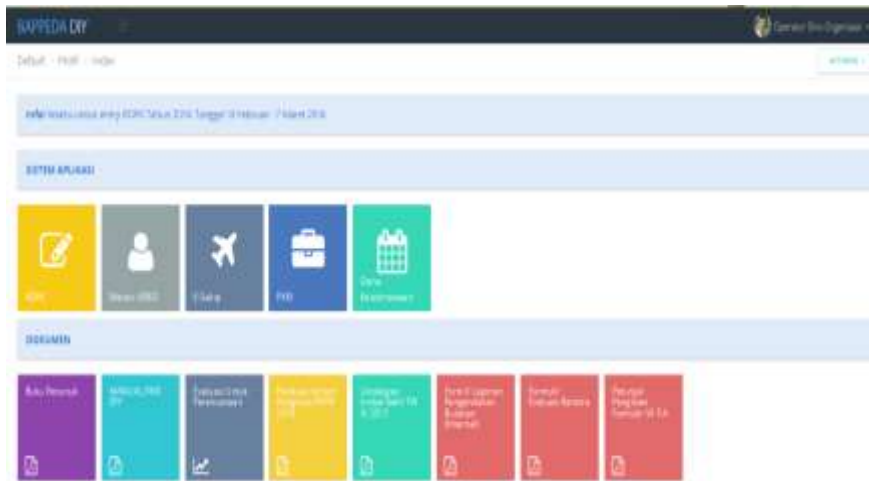
Keterangan tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 55,57% sehubungan dengan adanya *refocusing* kegiatan dan *realokasi* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Mengelola Dana Keistimewaan sebesar Rp 67.578.800.000,00,- digunakan untuk pembelian gedung/tanah bangunan.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *sungguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber:<https://sungguh.jogjaprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja tahun 2020 yang diperjanjikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan Bapak Gubernur DIY. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<u>Indikator:</u> Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan <u>Meta Indikator:</u> Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat dan akurat (20%) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)	%	100	100	100	100	100	Sangat Baik	100
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	<u>Indikator:</u> Optimalisasi aset aset pengelola barang milik daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai proyeksi aset pengelola	rupiah	n/a	7.107.452.565	6.453.519.026	3.069.093.332	47,56	Sangat Rendah	6.967.568.518

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<u>Indikator:</u> Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	<u>Meta Indikator:</u> Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat dan akurat (20) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)

Sumber data diolah dari evaluasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan penghitungan kualitatif akumulatif dari 5 (lima) sub meta indikator dan dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \sum PAD + \sum APBD + \sum LKD + \sum KAD + \sum PKD$$

Keterangan:

- TA = Laporan keuangan transparan dan akuntabel
- $\sum PAD$ = sub meta indikator meningkatnya PAD
- $\sum APBD$ = sub meta indikator APBD yang tepat waktu dan akurat
- $\sum LKD$ = sub meta indikator laporan keuangan akuntabel
- $\sum KAD$ = sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat
- $\sum PKD$ = sub meta indikator pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

Penghitungan masing-masing sub meta indikator sebagai berikut:

1. Sub meta indikator meningkatnya PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (n) dengan realisasi PAD Tahun sebelumnya (n-1), diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum PAD = PAD(n)/PAD (n-1)$$

Keterangan:

- $\sum PAD$ = meningkatnya PAD
- PAD(n) = realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020
- PAD (n-1) = realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019

2. Sub meta indikator APBD tepat dan akurat diukur melalui 2 komponen yaitu APBD yang tepat dengan melihat bukti dalam dokumen RAPBD TA.2020

disampaikan kepada DPRD DIY tanggal 10 September 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2020 yaitu APBD disusun paling lambat minggu kedua bulan September, sedangkan APBD yang akurat dapat dilihat dari konsistensi antara program dan kegiatan dalam KUA PPAS 2020 dan pengantaran RAPBD TA 2020, diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum \text{APBD} = (\text{AB} + \text{BD})/2$$

Keterangan

- $\sum \text{APBD}$ = APBD tepat dan akurat
- AB = APBD tepat (waktu) = 100%
- BD = APBD akurat = $85\%(\text{P2}/\text{P1}) \times 100\% + 15\%(\text{K2}/\text{K1}) \times 100\%$
- P1 = program sesuai KUA PPAS
- P2 = program sesuai RAPBD
- K1 = kegiatan sesuai KUA PPAS
- K2 = kegiatan sesuai RAPBD

3. Sub meta indikator laporan keuangan daerah yang akuntabel diukur dengan melihat kelengkapan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai PP.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri 13 tahun 2006 agar dapat dilakukan audit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum \text{LKD} = \text{LK1}(\text{sesuai}) + \text{KD2}(\text{tepat waktu})$$

Keterangan

- $\sum \text{LKD}$ = laporan keuangan daerah akuntabel
- LK1 = laporan keuangan sesuai Standar SAP (60%)
- KD2 = laporan keuangan dan pertanggungjawaban tepat waktu (40%)

4. Sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat dihitung dengan cara membandingkan jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dengan jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan, diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum KAD = \frac{\sum SP2D}{\sum SPM} \times 100\%$$

Keterangan

$\sum KAD$ = penatausahaan keuangan yang akurat

$\sum SP2D$ = jumlah SP2D yang diterbitkan

$\sum SPM$ = jumlah SPM yang di terima

5. Sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur melalui ketepatan, keakuratan dan konsistensi pengelolaan keuangan daerah pada evaluasi APBD Kab/Kota, pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan dan prosedur, serta mengoptimalkan kinerja BUMD dan BUKP, dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PKD = \sum EAP + \sum EAK + \sum EAD$$

Keterangan

PKD = pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

$\sum EAP$ = evaluasi APBD Kab/Kota

$\sum EAK$ = pengelolaan keuangan sesuai prosedur

$\sum EAD$ = realisasi deviden

Hasil penghitungan kualitatif kumulatif dari 5 (lima) sub meta indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut :

Tabel III.3.1 Pengukuran Capaian Sasaran 1

NO	Sub meta indikator	Target Sub Indikator	Hasil Sub indikator	Capaian Sub Indikator	Bobot
1	2			3	4
1	Sub meta indikator meningkatnya PAD ($\sum PAD$)	Rp1.993.435.291.133,20	Rp1.800.739.024.337,00	90,33%	18,07%
2	Sub meta indikator APBD tepat dan akurat ($\sum APBD$)	100%	100%	100,%	20,%
3	Sub meta indikator laporan keuangan daerah yang akuntabel ($\sum LKD$)	100%	100%	100%	20,%
4	Sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat ($\sum KAD$)	100%	100%	100%	20,%
5	Sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten ($\sum PKD$)	100%	100%	100%	20%
Jumlah (TA)				98,07%	

Kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.3.2 Target dan realisasi kinerja sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2019	Tahun 2020			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	98,07%	98,07%	100%	98,07%

Analisis Ketercapaian Sasaran Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 98,07%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target 98,07%, maka target tahun 2020 tidak tercapai.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100% terhadap target sebesar 100% terdapat penurunan realisasi sebesar 1,93%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut didukung dari :

a. Data Dukung Capaian Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam pembiayaan di wilayah Pemda DIY, peningkatan PAD diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Pemda DIY terhadap Pemerintah Pusat. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemda harus mengetahui potensi yang dimiliki daerah. Ada dua cara untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun salah satu wujud nyata dari kegiatan

intensifikasi ini yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber pendapatan. Peningkatan pendapatan dilakukan dengan alasan kebijakan dan alasan teknis. Alasan kebijakan, dalam era otonomi daerah PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.

Tercapainya sub meta indikator sasaran meningkatnya pengelolaan PAD didorong oleh penyesuaian regulasi, peningkatan sumber daya dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan dan penagihan pajak daerah, penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan aset, serta pembinaan terhadap BUMD yang telah berjalan cukup optimal.

Adapun Data Target APBD khususnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 3. APBD BPKA DIY Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Kode	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.934.073.885.772,71	2.078.783.660.208,18
4.1.1	Pajak Daerah	1.750.611.839.616,00	1.888.896.005.058,00
4.1.2	Retribusi Daerah	7.342.607.690,00	687.609.200,01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.997.899.680,29	99.880.255.777,75
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	90.121.538.786,42	89.319.790.172,42
Jumlah		1.934.073.885.772,71	2.078.783.660.208,18

Sumber : APBD DIY TA.2019 dan 2020, data diolah

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya intensifikasi pemungutan pajak dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak melalui percepatan layanan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kab/Kota secara online, penambahan jam layanan pada malam hari, penambahan operasional mobil keliling dan motor, optimalisasi drive thru, peningkatan sarana prasarana (Samsat peduli anak, ketersediaan fasilitas dan layanan khusus difabel) serta optimalisasi E-Posti. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menyusun peraturan daerah di bidang pendapatan, sedang intensifikasi pada retribusi daerah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD berpendapatan agar mereka dapat lebih berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk mempermudah layanan pembayaran retribusi menggunakan layanan *e-commerce*, dengan menggunakan Go Pay untuk pembayaran sewa Rusunawa dan layanan QRIS untuk pembayaran retribusi yang lain. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya pungutan liar. Pembayaran retribusi cukup dengan menggunakan kartu ATM dan uang langsung masuk rekening Pemerintah Daerah

Selama Tahun 2020, Pemerintah Indonesia bahkan seluruh dunia terkena pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian yang menurun drastis. Hal tersebut berimbas pula pada menurunnya realisasi PAD terutama dari sektor pajak. Penyumbang PAD terbesar adalah dari sektor pajak, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Realisasi PAD BPKA DIY Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Kode	Uraian	Tahun		Bertambah/berkurang	%
		2019	2020		
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.993.435.291.133,20	1.800.739.024.337,00	(192.696.266.796,20)	(0,10)

4.1.1	Pajak Daerah	1.773.940.604.572,00	1.646.559.198.863,00	(127.381.405.709,00)	(0,08)
4.1.2	Retribusi Daerah	7.432.218.400,00	736.782.032,00	(6.695.436.368,00)	(0,90)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.960.824.196,14	101.460.382.151,46	15.499.557.955,32	0,18
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	123.101.643965,06	51.982.661290,54	(71.118.982.674,52)	(0,57)
Jumlah		1.993.435.291.133,20	1.800.739.024.337,00	(192.696.266.796,20)	(0,10)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 per 28 Januari 2021, data diolah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah BPKA DIY pada APBD tahun 2019 sebesar Rp. 1.993.435.291.133,20 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.800.739.024.337,00. Artinya terhadap realisasi APBD tahun 2020 terdapat penurunan PAD sebesar Rp 192.696.266.792,20 atau 10,70%.

Dampak ekonomi akibat pandemi mempengaruhi kemampuan masyarakat wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, untuk itu Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan pajak, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 26 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB) yang disahkan pada 1 April 2020 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain itu di akhir Tahun 2020 diupayakan penambahan pelayanan pembayaran pajak melalui bank selain BPD

Upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selaras dengan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, serta telah mendapat apresiasi Pemerintah Pusat dengan penganugerahan penghargaan berskala nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang diterima oleh KPPD DIY di Kabupaten Sleman atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) .

Gambar III. 1. Penghargaan yang diterima.



b. Data Dukung Capaian APBD tepat dan akurat

RAPBD TA 2021 dan Perubahan RAPBD 2020 disampaikan ke DPRD dan ditetapkan tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2021 maupun penyusunan PAPBD TA.2020 dan program dan kegiatannya pada RAPBD konsisten dengan KUA dan PPAS TA 2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.3.5 Penetapan APBD

Uraian	Tanggal		Keterangan
	Pengantaran	Penetapan	
APBD 2021	10 September 2020	18 Desember 2020	tepat = 100%
PAPBD 2020	1 Agustus 2020	27 Oktober 2020	

Sumber : BPKA DIY, 2020, data diolah

Tabel III.3.6 Program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD TA 2021

Uraian	Jumlah		Keterangan
	Program	Kegiatan	
KUA PPAS	152	261	akurat = 100%
RAPBD	152	261	

Sumber : BPKA DIY, tahun 2020, data diolah

Akumulasi penghitungan data dalam kedua tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \sum \text{APBD} &= (\text{AP} + \text{BD}) / 2 \\
 &= (100\% + ((85\% (152/152) \times 100\%) + (15\% (261/261) \times 100\%))) / 2 \\
 &= (100\% + 85\% + 15\%) / 2 \\
 &= 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, sub meta indikator APBD tepat waktu dan akurat tercapai 100% sehingga bobot 20% terpenuhi.

Upaya yang dilakukan agar penyusunan APBD dan Perubahan APBD tepat waktu sesuai pedoman penyusunan APBD dan akurat dengan indikator konsistensi antara program dan kegiatan dalam KUA dan PPAAS dengan RAPBD yang dihantarkan adalah dengan selalu mempedomani peraturan perundangan dalam penyusunan APBD.

c. Data Dukung Capaian laporan keuangan daerah yang akuntabel

Adapun data penyusunan laporan keuangan Pemda DIY sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.3.7 Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY

No	Uraian	Penyajian Laporan		Penyusunan Laporan		Ket.
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Unsur SAP (PP.71/2010) (L1)					
	1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	v	-			Sesuai
	2) Neraca	v	-			

	3) Laporan Operasional (LO)	v	-			
	4) Laporan perubahan ekuitas (LPE)	v				
	5) Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	v	-			
	6) Laporan Arus Kas (LAK)	v	-			
Nilai (L1)						60%
2	Penyusunan Laporan Keuangan (Permendagri 13/2006) (K2)					
	1) Laporan Keuangan Pemda DIY			Maret 2020	-	Tepat
Nilai (K2)						40%

Sumber : LHP BPK RI Tahun 2019, data diolah

Penghitungan sesuai data di atas, hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \Sigma \text{LKD} &= \text{LK1 (sesuai)} + \text{KD2 (tepat)} \\
 &= 60\% + 40\% \\
 &= 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

Pada akhir periode APBD, Kepala BPKA DIY selaku SKPKD dan SKPD harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan SKPD selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Mengacu pada PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP Berbasis Accrual pada Pemerintah Daerah, sejak tahun 2015 Pemerintah Daerah harus menerapkan SAP berbasis akrual.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan Pemda DIY Tahun 2019 un audited selesai disusun pada tanggal 31 Januari 2020. Setelah dilakukan reuiu oleh Inspektorat DIY kemudian disampaikan kepada BPK RI pada bulan Maret 2020. Pada tahun 2020 Pemda DIY memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK yang ke 10 (sepuluh) kali berturut-turut terhadap laporan keuangan Pemda DIY.

Tabel III.3.8 Opini BPK RI dalam 5 tahun terkahir

Tahun	Opini	Keterangan
1	2	3
2014	WTP	Tanpa paragraf penjas
2015	WTP	Tanpa paragraf penjas
2016	WTP	Tanpa paragraf penjas
2017	WTP	Tanpa paragraf penjas
2018	WTP	Tanpa paragraf penjas
2019	WTP	Tanpa paragraf penjas

Sumber : BPK RI, Tahun 2020 (data diolah)

Atas prestasi yang diraih selama 10 kali secara berturut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh penghargaan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar III. 3. Penghargaan yang diterima.



d. Data Dukung Capaian penatausahaan keuangan yang akurat

Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dan dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah selama tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel III.3.9 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1.	SP2D		
	Belanja Langsung	7.046 dokumen	-
	Belanja tidak langsung non Gaji	276 dokumen	
	Belanja tidak langsung Gaji	2.322 dokumen	
2.	SPM		
	Belanja Langsung	7.046 dokumen	-
	Belanja tidak langsung non Gaji	276 dokumen	
	Belanja tidak langsung Gaji	2.322 dokumen	

Sumber: BPKA SIPKD, tahun 2020, data diolah

Penghitungan dari data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\sum \text{KAD} &= \frac{\sum \text{SP2D}}{\sum \text{SPM}} \times 100\% \\ &= \frac{7.046 + 276 + 2.322}{7.046 + 276 + 2.322} \times 100\% \\ &= 100\% = 20\%\end{aligned}$$

Hasil penghitungan adalah 100%, artinya sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat bobot 20% tercapai.

Upaya yang dilakukan agar penatausahaan keuangan selalu akurat antara lain pencairan dilakukan dengan teliti dan cermat, komunikasi dengan OPD pengelola terus dibangun, sistem pendukung memadai, sosialisasi atas aturan pemerintah dalam teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan baik belanja

langsung maupun belanja tidak langsung gaji dan non gaji khususnya dalam implementasi transaksi non tunai.

e. Data Dukung Capaian kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah

Data evaluasi APBD Kab/Kota yang ditindaklanjuti, pembinaan pengelolaan keuangan maupun realisasi optimalisasi kinerja BUMD dan BUKP, sebagaimana tabel di berikut :

Tabel III.3.10 evaluasi APBD , pembinaan pengelola keuangan, dan optimalisasi BUMD

No.	Uraian	Bobot (Target)	Realisasi	Ket
1	2	4	5	
1	Evaluasi APBD Kab / Kota yang ditindaklanjuti (ΣEAP)	33,34%	33,34%	
1.1	Pertanggungjawaban APBD TA. 2019		6,67%	
1.2	APBD TA.2020		16,67%	
1.3	Perubahan APBD TA. 2020		10,00%	
2	Pembinaan Pengelolaan keuangan (ΣEAK)	33,33%	33,33%	
2.1	Regulasi pengelolaan keuangan daerah rutin		26,67%	
2.2	Regulasi pengelolaan keuangan daerah insidentiiil		6,66%	
3	Optimalisasi kinerja BUMD (EAD)	33,33%	33,33%	
3.1	NPL		16,66%	
3.2	Deviden		16,67%	

Sumber: BPKA DIY tahun 2020 (data diolah)

Dari data diatas, perhitungan akumulasi realisasi komponen evaluasi APBD (ΣEAP) sebesar 33,34%, akumulasi realisasi komponen pembinaan pengelolaan keuangan (ΣEAK) adalah 33,33%, akumulasi realisasi komponen optimalisasi kinerja BUMD (ΣEAD) yaitu 33,33%. Hasil penghitungan sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \sum PKD &= \sum EAP + \sum EAK + \sum EAD \\
 &= 33,34\% + 33,33\% + 33,33\% \\
 &= 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh hasil 100%, maka bobot 20% tercapai.

Agar kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah selalu konsisten dilakukan dengan upaya koordinasi intensif dengan pihak terkait, kepatuhan

terhadap rencana yang ada disamping menjalankan kebijakan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Penyesuaian regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik.
- d. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Pandemi Covid 19 menghancurkan semua sektor ekonomi, menyebabkan penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak

3.1.2. Sasaran 2 : Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Kinerja sasaran sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel III.3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Optimalisasi aset - aset Pemda DIY	<u>Indikator:</u> Optimalisasi aset aset pengelola barang milik daerah	<u>Meta Indikator:</u> Nilai proyeksi aset pengelola

Sumber data dihitung dari penghitungan nilai rupiah realisasi atas proyeksi aset-aset yang dirumuskan sebagai berikut :

$$OAP = \sum ORD + \sum OTP + \sum ODS$$

Keterangan:

OAP = Optimalisasi aset

$\sum ORD$ = retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan

$\sum OTP$ = sewa lahan, tanah dan bangunan

$\sum ODS$ = kontribusi denda atas keterlambatan

Kinerja sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY dengan indikator Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.3.12 Target dan Realisasi Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	TAHUN 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
					Target	Realisasi	Realisasi %		
2	Optimalisasi Aset-aset Pemda	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rp	7.107.452.565	6.453.519.026	3.069.093.332	47,56	6.967.568.518	44,05

Analisis Ketercapaian Sasaran Optimalisasi Aset-aset Pemda adalah sebagai berikut:

- Tercapai Rp 3.069.093.332,- dari target (proyeksi) Rp 6.453.519.026,- dengan demikian persentase realisasi terhadap target = 47,56%, sehingga target tahun 2020 tidak tercapai.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (2019) sebesar Rp7.107.452.565,00 capaian kinerjanya 45,99%.
- Sedang realisasi capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar Rp6.967.568.518,00, capaian kinerjanya 46,99%

Keberhasilan capaian Indikator Optimalisasi Aset-aset Pemda tersebut didukung dari:

Data dukung capaian nilai proyeksi aset pengelola Barang Milik Daerah

Data proyeksi dan realisasi optimalisasi aset pada pengelola barang milik daerah sebagai tersebut pada tabel berikut ini :

Tabel III.3.13 Nilai proyeksi dan realisasi optimalisasi aset tahun 2020

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi rumah dinas	105.394.400
2.	Retribusi tanah bangunan	279.357.932
3.	Sewa lahan parkir Malioboro Mall	1.000.000.000
4.	Sewa tanah bangunan	837.180.000
5.	Kontribusi PT Yogya Indah Sejahtera	847.161.000
	Jumlah(Σ)	3.069.093.332

Sumber: Laporan keuangan akhir tahun Pemda DIY TA.2020 un audited, data diolah.

Penghitungan nilai rupiah realisasi atas proyeksi aset-aset pengelola barang milik daerah didasarkan pada data realisasi yang diperoleh melalui laporan keuangan akhir tahun Pemda DIY TA.2020 un audited dengan cara menjumlahkan realisasi retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan, Sewa lahan, tanah dan bangunan, dan kontribusi dari denda atas keterlambatan sewa, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$OAP = \Sigma ORD + \Sigma OTP + \Sigma ODS$$

Keterangan:

OAP = Optimalisasi aset

ΣORD = retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan

ΣOTP = sewa lahan, tanah dan bangunan

ΣODS = kontribusi denda atas keterlambatan

Hasil penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 OAP &= \Sigma ORD + \Sigma OTP + \Sigma ODS \\
 &= 105.394.400 + 279.357.932 + 1.000.000.000 + 837.180.000 + \\
 &\quad 847.161.000 \\
 &= \underline{3.069.093.332}
 \end{aligned}$$

Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah tidak mencapai target dikarenakan faktor eksternal terjadinya pandemi secara global yang berdampak kepada terganggunya aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan tidak hanya nasional namun juga regional.

Dampak pandemi tersebut di wilayah DIY menyebabkan penyewa BMD mengakhiri kontrak, di antaranya Jogja Expo Center. Pandemi COVID-19 menyebabkan even-even berskala besar untuk sementara tidak boleh diselenggarakan karena berpotensi untuk meningkatkan penularan virus. Selain itu banyak penyewa lahan BMD yang mengajukan keringanan pembayaran sewa.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Komitmen dan sinergitas yang semakin baik dari seluruh OPD Pemda DIY terhadap seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah.
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Belum adanya perencanaan yang efektif dan efisien, sehingga perencanaan kebutuhan yang ada sering berbeda dengan kebutuhan yang sebenarnya.
- b. Terdapat permasalahan lokasi tanah yang tidak strategis sehingga pemerintah daerah DIY belum bisa mengoptimalkan sepenuhnya.
- c. Aturan-aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang rigid, sehingga relatif kurang fleksibel untuk diterapkan dengan dunia usaha.
- d. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani pemanfaatan BMD serta kurang memiliki skill terutama dalam bidang entrepreneurship.
- e. Masih belum lengkapnya input data pada sistem informasi aset yang ada.

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel III.3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100 %	97,42 %	97,42	82.295.377.310,00	81.346.533.505,00	96,06
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY	6.453.519.026	3.268.993.332	50,64	2.857.331.500,00	2.664.617.892,00	93,26
Jumlah						85.152.708.810,00	84.011.151.397,00	98,65
Program pendukung						21.630.943.340,00	20.511.310.141,00	94,82
Total Belanja Langsung						106.783.652.150,00	104.522.461.538,00	97,88

Berdasarkan tabel III.3.14 dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 85.152.708.810,00, terealisasi Rp 84.011.151.397,00 atau 98,65%. Sisa anggaran sebesar Rp1.141.557.413,00 atau 1,34% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi honorarium dan belanja perjalanan dinas narasumber pusat yang tidak bisa hadir pada saat acara sosialisasi;
- Efisiensi honorarium harian non PNS sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 903/3398 tanggal 20 Maret 2020 bahwa PNS tidak boleh menerima honor;
- Sisa belanja perjalanan dinas luar daerah (at cost).

Belanja tidak terserap 100% sedang keseluruhan sasaran strategis OPD tidak tercapai 100%, dengan demikian terjadi in efisiensi belanja sebesar Rp1.141.557.413,00 (1,34%)

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

- a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Pemanfaatan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pertemuan secara online (*google meet dan zoom meeting*).

Dengan adanya pandemi COVID-19 menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk tidak menyerah kepada keadaan, tetapi berpikir lebih kreatif dalam menciptakan inovasi pelayanan publik, mengelola pengaduan pelayanan publik yang optimal serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Inovasi yang telah dikembangkan oleh KPPD DIY di Kab/kota yaitu :

- Layanan Pojok Simpatik pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman.
Pojok Simpatik adalah sebuah layanan terbaru dari KPPD DIY di Kabupaten Sleman untuk wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Layanan Pojok Simpatik terdiri dari layanan pusat informasi segala urusan kesamsatan, layanan pengaduan terkait pelayanan kesamsatan maupun pengaduan terhadap kejadian tindakan pungutan liar (pungli) maupun indikasi gratifikasi dan korupsi.
- Layanan Samsat on Call pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman.
Layanan ini menyajikan pembayaran pajak tahunan tanpa harus datang ke Kantor Samsat, tetapi unit Samsat yang akan mendatangi lokasi wajib pajak. Samsat on Call hanya bisa diakses secara kolektif, misalnya oleh komunitas otomotif, pabrik, kantor, kelurahan maupun komunitas lainnya.
- Layanan Samoling (Samsat Mobil Keliling) pada KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo
- Layanan *Go Door* Pak Mo (*Go Door* Pakai Motor) untuk Lansia pada KPPD DIY di Kota Yogyakarta

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran dengan 2 indikator kinerja utama, pada tahun 2020, dari 2 indikator tersebut salah satunya tidak memenuhi target yang ditetapkan 100%.
2. Kendala, hambatan permasalahan kinerja yang menyebabkan tidak mencapai sasaran antara lain:
 - a. Adanya pandemi yang mengakibatkan perekonomian dan daya beli masyarakat yang turun secara signifikan
 - b. Informasi layanan obyek-obyek retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah belum seluruhnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
 - c. Aset-aset *idle* belum seluruhnya teridentifikasi terutama aset-aset yang terdapat pada pengguna dan atau kuasa pengguna barang.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan dirumuskan dalam Rencana Aksi dan tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Meningkatkan komitmen dengan stakeholder terkait pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- b) Menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah
- c) Melaksanakan pengelolaan BMD secara terintegrasi dan optimalisasi BMD untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Visi : *Terwujudnya peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*

Misi : *1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis*

Tupoksi : *melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan barang daerah*

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Ket
					TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas pengelola keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	%	100	100	100	100	100	
		Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦑꦼꦧꦠꦶꦃꦲꦤ꧀ꦢꦺꦤꦸꦫꦺꦗꦏꦼꦲꦠꦸꦛꦏꦺꦛꦠꦺꦩꦶꦮꦏꦏꦸꦧꦸꦤꦺꦴ
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818
Website : <http://bpka.jogjaprov.go.id>, Email : bpkadiy@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya *refocusing* kegiatan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA TUGAS KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 196505121086021802

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2020

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	persen	100,00	Triwulan I	21,00
					Triwulan II	46,00
					Triwulan III	75,00
					Triwulan IV	100,00
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	6.453.617.858,00	Triwulan I	163.605.570,00
					Triwulan II	3.872.111.415,00
					Triwulan III	5.162.815.220,00
					Triwulan IV	6.453.617.858,00

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	122.855.773.920,00	106.783.652.150,00	(16.072.121.770,00)	
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.544.560.000,00	2.180.523.000,00	(384.037.000,00)	Sumber Anggaran:
Program Pelapran dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.133.300.000,00	910.057.500,00	(223.242.500,00)	1. APBD: Rp39.204.852.150,00
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	374.630.000,00	449.997.500,00	75.367.500,00	2. Danais: Rp67.578.800.000,00
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.217.970.000,00	788.106.000,00	(419.864.000,00)	
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	8.889.241.160,00	6.983.369.310,00	(1.930.874.850,00)	
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	3.923.370.000,00	3.459.527.000,00	(463.843.000,00)	
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (urusan Tata Ruang)	67.605.100.000,00	57.578.800.000,00	(26.300.000,00)	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.597.456.000,00	2.734.387.500,00	(136.931.500,00)	
Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	846.560.000,00	122.944.000,00	(723.616.000,00)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.512.209.760,00	10.321.487.840,00	(1.190.721.920,00)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.077.927.000,00	11.224.266.100,00	(10.853.658.900,00)	

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah dalam situasi perekonomian yang masih terdampak pandemi COVID-19.
2. Volume anggaran berkurang sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
3. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
4. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
5. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
PELAKSANA TUGAS KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP.196605121986021002

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

ꦏꦸꦏꦼꦩꦸꦏꦺꦴꦩꦠꦸꦫꦺꦴꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦺꦤ꧀

Kompleks Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 13-03-2020

Nomor : 700/00863
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 40/II/INSP/2020 Tanggal 3 Februari 2020 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan tujuan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;

- 3) Implementasi Pengukuran.
 - a. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang Dilaporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja yang Dilaporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memperoleh nilai sebesar **87,60** kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel;
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,13 atau 90,43% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,60 atau 90,42% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,27 atau 88,44% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,25 atau 82,50% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 16,35 atau 81,77% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2018, sudah dilakukan perbaikan kinerja pada Aspek Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja khususnya Implementasi Renstra untuk

mencamtumkan inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu, Aspek Pengukuran Kinerja khususnya Implementasi Kinerja Utama agar dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala, Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya pada penyampaian informasi kinerja yang informatif dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, khususnya Kinerja yang dilaporkan pada peningkatan perolehan kinerja/penghargaan lainnya.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



Tembusan:
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Lampiran 4 : Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
Yogyakarta 55213

TANGGA
PAN/TIN
DAK
LANJUT

EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA (2019)

OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Perihal	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01335, tanggal 6 Mei 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	Rekomendasi: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya: 1. mempertahankan kinerja yang telah dicapai. 2. berupaya meningkatkan kinerja khususnya pada aspek evaluasi internal dan aspek pencapaian sasaran / kinerja organisasi.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya telah melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1. Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk pertemuan Senin pagi maupun pembinaan rutin kepegawaian yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali; 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan menyusun aplikasi capaian kinerja;

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Drs Beny Suharsono, M.Si
NIP.19601003 198803 1 006

Lampiran 5 : Profil Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Nama Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala	1	S.2/S.1	1	S.1	v	
2.	Sekretaris	1	S2, S1	1	S.2		v
3.	Kepala Bidang Pendapatan	1	S.2/S.1	1	S.1	v	
4.	Kepala Bidang Anggaran Belanja	1	S.2/S.1	1	S.1		v
5.	Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah	1	S.2/S.1	0	-	-	-
6.	Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah	1	S2/S.1	1	S.2		v
7.	Kepala Bidang Akuntansi	1	S.2/S.1	1	S.2		v
8.	Kepala Bidang Pengelola BMD	1	S.2/S.1	1	S.1	v	-
9.	Kepala UPTD	5	S.1	5	S2	v	v
10.	Kasubagian Umum	1	S.1	1	1	v	
11.	Kasubag Keuangan	1	S.1	0	-	-	-
12.	Kasubag Program	1	S.1	1	1		v
9.	Kasubid Pajak	1	S2, S1	1	S2		v
10.	Kasubid Retribusi	1	S2, S1	1	S1		v
11.	Kasubid Pendapatan Lain-Lain	1	S2, S1	1	S2	v	
12.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Pemerintahan	1	S2, S1	1	S2	v	
13.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Perekonomian	1	S2, S1	1	S2	-	v
14.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Sarana dan Prasarana	1	S2, S1	1	S1	-	v
15.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Sosbud	1	S2, S1	1	Sarjana Muda	v	-
16.	Kasubdid Akuntansi Sektor Pemerintahan	1	S2, S1	1	S2	v	-
17.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Perekonomian	1	S2, S1	1	S2		v
18.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sarana dan Prasarana	1	S2, S1	1	S1	v	
19.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sosbud	1	S2, S1	1	S2		v
20.	Kasubdid Akuntansi Sektor Pemerintahan	1	S2, S1	1	S2	-	v
21.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Perekonomian	1	S2, S1	1	S1		v
22.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sarana dan Prasarana	1	S2, S1	1	S1	-	-
23.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sosbud	1	S2, S1	1	S1		v
24.	Kasubid Pengelolaan Barang Daerah	1	S2, S1	1	S1	v	-
25.	Kasubid Pendayagunaan Barang Daerah	1	S2, S1	-	S1	-	-
26.	Kasubid Monitoring dan Evaluasi	1	S2, S1	1	S1	v	-

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Kasubid Bina APBD	1	S2, S1	1	S1	√	√
28.	Kasubid Bina BUMD dan BUKP	1	S2, S1	1	S2	√	-
29.	Kasubid Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	1	S2, S1	1	S1	√	-
30.	Kasubag Umum	1	S2, S1	1	S1	√	-
31.	Kasubag Keuangan	1	S2, S1	-	-	-	-
32.	Kasubag Program dan Data TI	1	S2, S1	1	S1	-	√
B	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
C.	Jabatan Pelaksana Substantif						
33.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	9	S2, S1	8	S2, S1, SLTA	√√√√√	√√
34.	Analisis Pajak	4	S.1	2	S.1	√	√
35.	Analisis Retribusi	4	S.1	3	S.1	√	√√
36.	Analisis Pendapatan Daerah	4	S.1	3	S.1, SLTA	√	√√
37.	Analisis Perencanaan Anggaran	12	S.1	15	S.1,SLTA	√√√√√√√	√√√√√
38.	Pengelola Perbendaharaan	12	S.1	13	S.2, S.1 SLTA	√√√√√	√√√√√√
39.	Analisis Pengelolaan Keuangan	8	S.1, D.4	4	S.1, SLTA	√√	√
40.	Pengevaluasi Perkembangan BUMD	2	S.2	2	S.2	√√	-
41.	Penyusun Laporan Keuangan	12	S.1	9	S.2, S.1, D.3, SLTA	√√√√√	√√√
42.	Analisis Pengelola Kekayaan Daerah	12	S.1	15	S.2, S.1,SLTA	√√√√√√√	√√√√√
43.	Verifikator Pajak	47	S.1	22	S,2, S.1,SLTA	√√√√√√√√√	√√√√√√√√√
D.	Jabatan Pelaksana Administratif						
44.	Bendahara	14	S.1	15	S.1,S1,SLTA	√√√√√√√	√√√√√
45.	Verifikator Data Laporan Keuangan	7	D.3	2	S1	√	√
46.	Pengelola Akuntansi	7	D.3	3	SLTA	√	√√
47.	Pengelola Barang Milik Negara	12	D.3	7	S.1,D.3,SLTA	√√√√√	√
48.	Pengelola Gaji	6	D.3	1	S1	√	
49.	Pengadministrasi Keuangan	11	D.3	2	SLTA	-	√√
50.	Pengadministrasi Kepegawaian	7	D.3	6	S.1,D.3,SLTA	√√√√	√√
51.	Pengadministrasi Pajak	46	D.3	6	S1, SLTA	√√√√	√√
52.	Pengadministrasi Umum	8	D.3	6	D.3, SLTA	√√√√	√√
53.	Pengadministrasi Persuratan	6	D.3	3	S.1, SLTA	√√	√
54.	Pranata Kearsipan	9	D.3	3	S.1, D3	√√	√
55.	Teknisi Sarpras	6	D.3	2	SLTP	√√	-
56.	Pengelola Sistem dan Jaringan	2	S.1	1	S.1	√	√√
57.	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	44	D.3	14	S.1,D.4,SLTA	√√√√√√√√	√√√√
58.	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	17	D.3	8	S.1	√√√√	√√√√
59.	Pengelola Data Wajib Pajak / Retribusi	23	D.3	13	S.1,D.3,SLTA	√√√√√√√√	√√√
60.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	15	S.1	7	S.2,S.1,SLTA	√√√√	√√√
61.	Pengemudi	5	SMK/SMA	2	SMP	√√	-
	Jumlah	423		244		148	96

INOVASI PADA KPPD DIY



POJOK SIMPATIK

**KPPD DIY
di Kab. Sleman**

SAMSAT ON CALL
Layanan Pajak Tahunan
TRIHARJO SLEMAN

Hari, Tanggal : Jumat, 18 Desember 2020
Lokasi : Balai Dukuh Krapyak Triharjo Sleman
Jam 09.00 - 10.30 WIB

#05
kami datang melayani anda..

Persyaratan:
STNK Asli + 1 Lbr Fotocopian
KTP/KK/SIM Asli + 1 Lbr Fotocopian

SAMSAT ON CALL



SAMOLING SAMSAT MOBIL KELILING

Setiap pasaran Wage
di Pasar Hewan Baru Pengasih

**Melayani Pembayaran
Pengesahan STNK Tahunan**

Syarat:

STNK

KTP

(Asli dan fotocopy rangkap 1)

SAMOLING



GO DOOR PAK MO UNTUK LANSIA

PT. BUANALAND AGUNG

No : 004-PRO/DIRUT/BLA/JKT/V/2020
Hal : Penyerahan Kembali Pengelolaan Gedung JEC

Jakarta, 28 Mei 2020

Kepada Yth.
Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek Kepatihan
Yogyakarta
Up. Sekretaris Daerah
Bapak Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji

Dengan hormat,

Pertama-tama kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1.441 H, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Menyambung komunikasi kita melalui surat perihal Pengelolaan Gedung JEC dimasa waktu pandemik Covid19 - Corona, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana kita pahami bersama, sampai dengan saat ini wabah Covid19 - Corona masih menunjukan angka pasien positif yang tinggi dan mempunyai tren belum turun. Kita tidak bisa mempredisikan kapan Corona ini akan segera berakhir. Sementara wabah ini juga membawa dampak ekonomi yang sangat besar, terutama bagi usaha pengelolaan JEC. Dimana sejak bulan Maret pertengahan kami tutup, tidak ada event dan tidak ada pendapatan.
2. Sesuai dengan permintaan pemprov DIY, surat nomor 934/6830 tanggal 23 April 2020, sampai dengan saat ini kami telah melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset JEC.
3. Kondisi ini sangat memberatkan keuangan kami, dan kami tidak mampu lagi membiayai pengelolaan JEC pada waktu yang akan datang.
4. Sehingga pada kesempatan ini, kami bermaksud menyerahkan kembali pengelolaan gedung dan aset JEC kepada Pemprov DIY, pada periode akhir juni 2020. Dengan teknis serah terima akan kita didetailkan kemudian.
5. Bahwasanya setelah wabah Covid 19 - Corona selesai dan perekonomian telah berjalan normal, dan kami diberikan kepercayaan untuk kembali mengelola JEC, kami siap untuk bersama-sama membahas pengelolaan tersebut.

PT. BUANALAND AGUNG

Demikian kami sampaikan menjadikan pertimbangan, atas kepercayaan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BUANALAND AGUNG


PT. BUANALAND AGUNG

Ir. Agung Trisianto, M.M.
Direktur Utama

- Cc.
1. Ka. BPKA Propinsi DIY (Bapak Bambang Wisnu Handoyo)
 2. Arsip

SURAT PENYERAHAN KEMBALI PENGELOLAAN JEC KEPADA PEMDA DIY

